



Aksi Legislatif dan Kerangka Hukum Untuk Menjamin Akses Terhadap Air

Mohamad Mova AlAfghani, PhD
mova@alafghani.info

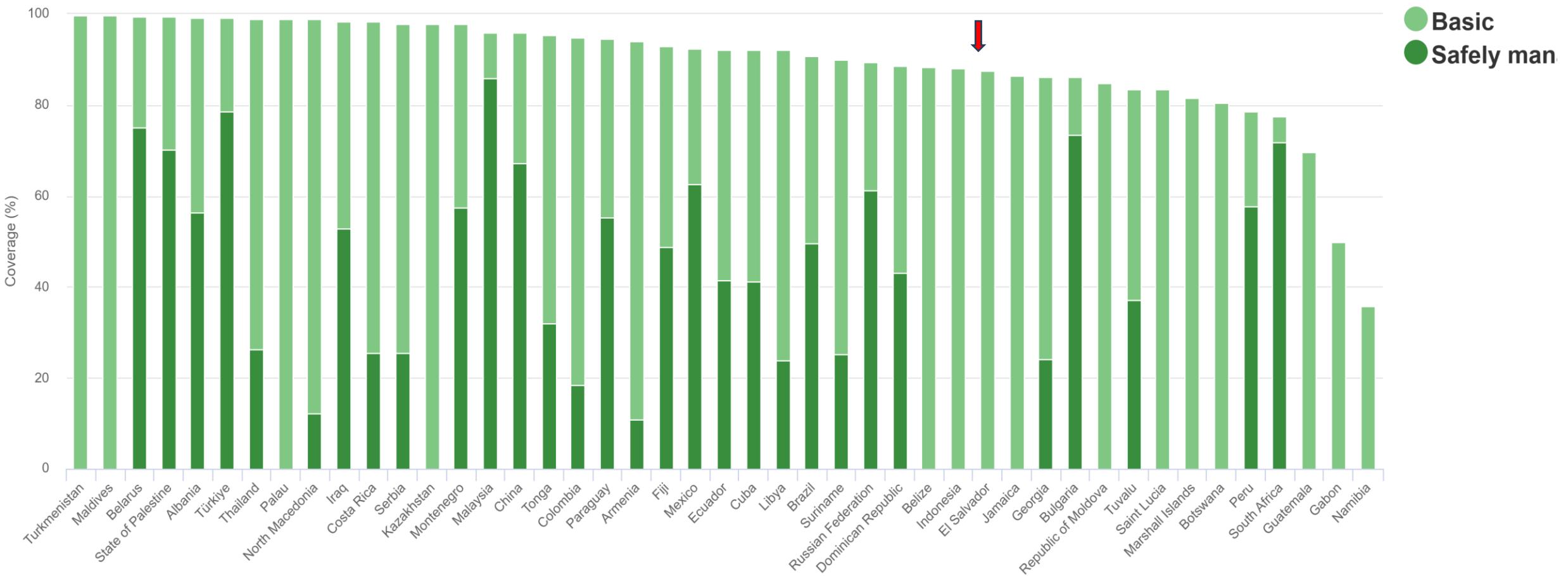
Parliamentarians for Climate Action and Ending Water Insecurity

BKSAP Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Westminster Foundation for Democracy dan Uni Eropa

Hotel Alana Sentul City | Rabu, 15 Mei 2024

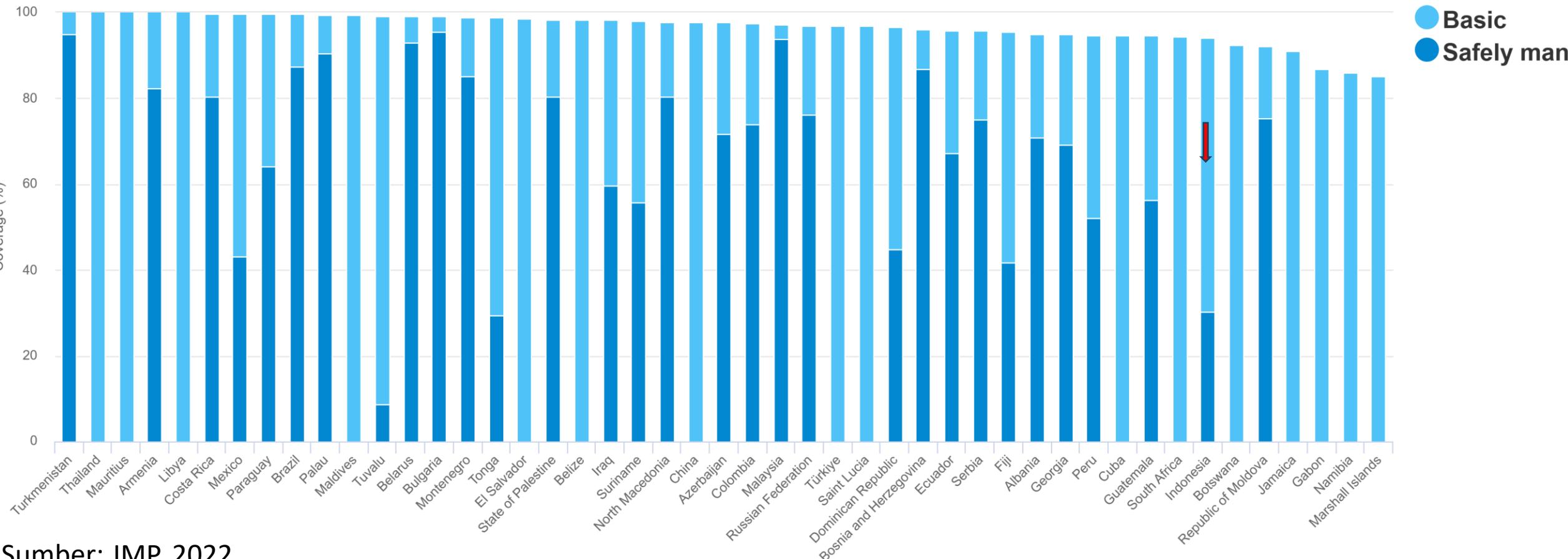
Bagian 1: Status Akses Air dan Sanitasi

Household data - Sanitation - 2022 - Service Levels



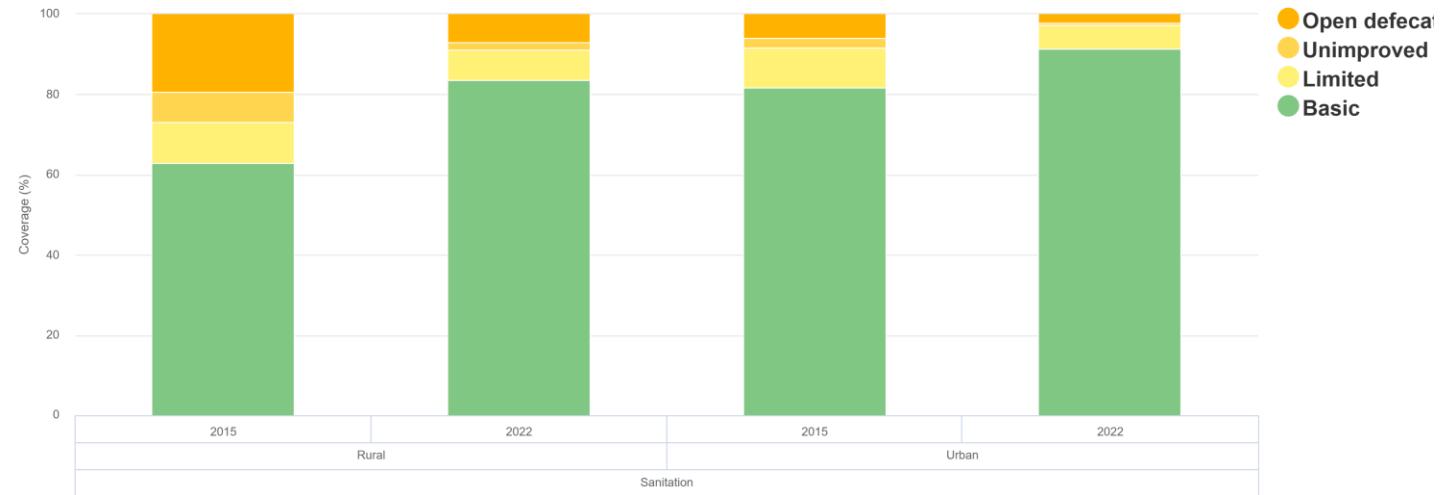
Sumber: JMP, 2022

Household data - Drinking Water - 2022 - Service Levels



Sumber: JMP, 2022

Household data - Indonesia - Service Levels



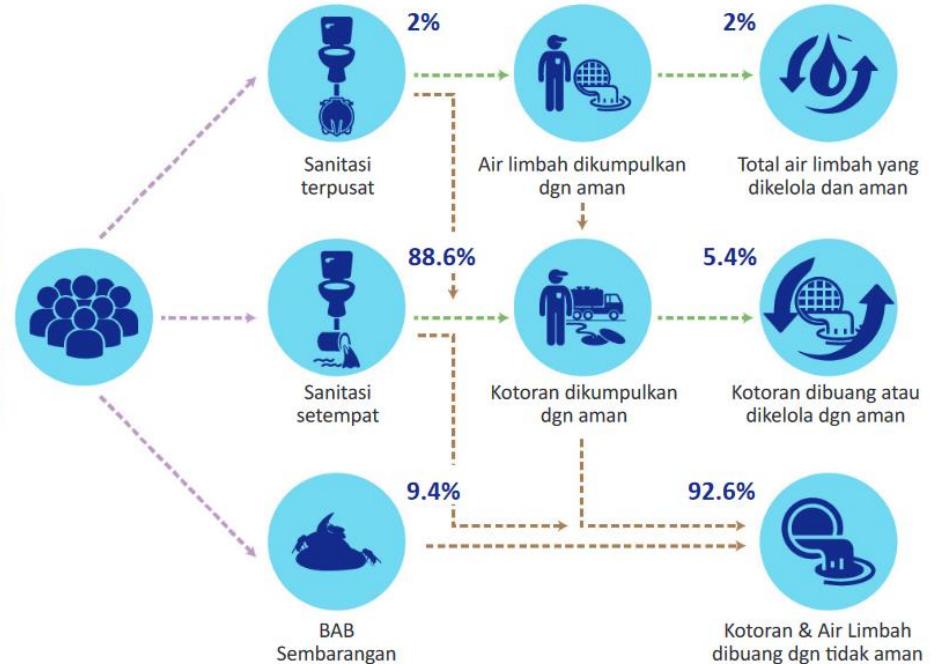
Sanitasi Indonesia dalam Kondisi Menyedihkan

Definitions of access to sanitation facilities

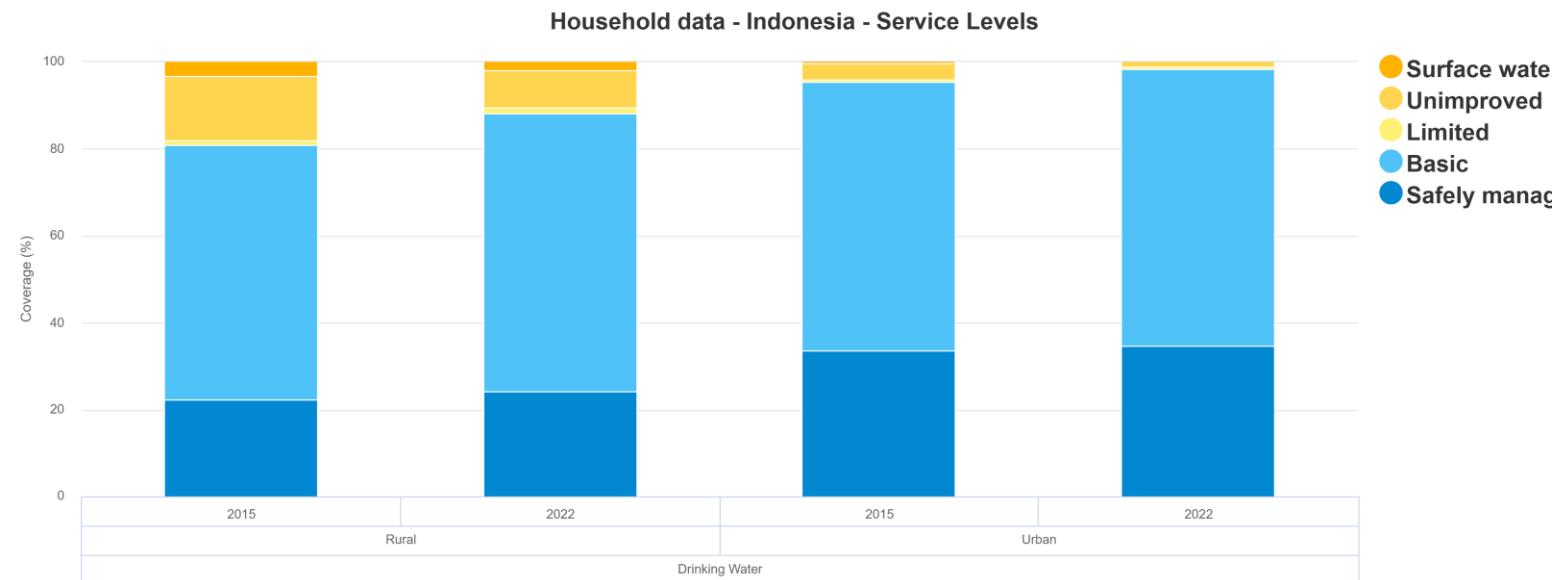
All countries have agreed to work towards universal access to safe sanitation by 2030 as part of the UN Sustainable Development Goals.



Penduduk Perkotaan
110 Jt



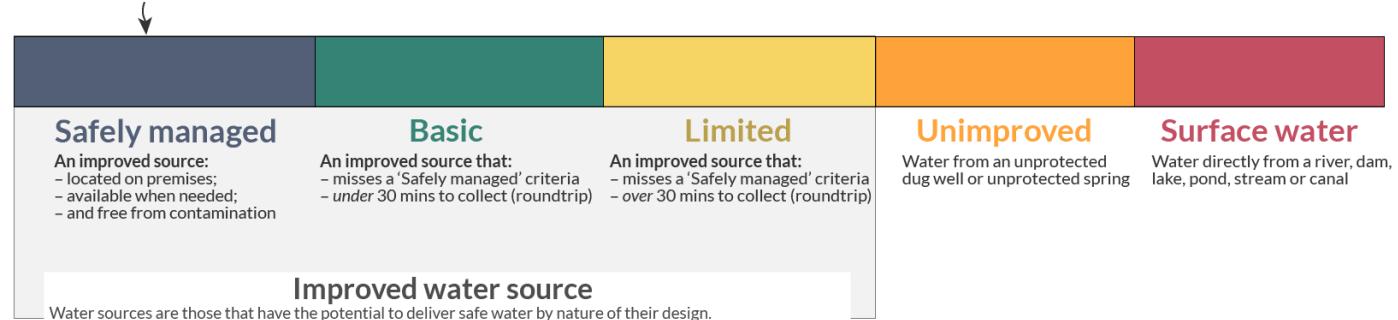
Bappenas, 2019



Definitions across the drinking water ladder

All countries have agreed to work towards universal access to safe drinking water by 2030 as part of the UN Sustainable Development Goals.

Our World
in Data



Source: WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation.
OurWorldinData.org – Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the author Hannah Ritchie.



Permasalahan Air dan Sanitasi di Indonesia

Aspek	Rincian
Akses Penyediaan Air	Hanya 23% (2018) warga Indonesia yang memiliki akses ke air perpipaan, jauh di bawah target pemerintah sebesar 60%.
Penggunaan Air Tanah	Penggunaan air tanah mandiri sangat tinggi, mengakibatkan penurunan muka air tanah dan amblesnya tanah.
Efisiensi Sistem	Sistem penyediaan air banyak yang kurang efisien dengan penggunaan kapasitas pengolahan yang rendah dan tingginya air tidak terhitung.
Kualitas Air	Kualitas air pipa seringkali tidak memenuhi standar, dengan pengawasan yang minim.
Akses Sanitasi	Hanya kurang dari 2% populasi yang memiliki akses ke jaringan sanitasi; 17% penduduk desa masih praktik buang air besar sembarangan.
Pengolahan Air Limbah	Hanya 7,4% air limbah kota yang diproses secara aman; 92,6% lagi dibuang tanpa pengolahan.
Sumber Polusi	Sekitar 70% polusi air tanah berasal dari tangki septik yang bocor dan pembuangan septik yang tidak tepat.
Dampak Kesehatan Publik	Berkontribusi pada prevalensi stunting yang tinggi di kalangan anak-anak (35% dari anak-anak di bawah usia lima tahun), dikaitkan dengan polusi air dan sanitasi yang tidak memadai.



Selain gizi yang baik, sanitasi yang baik juga diperlukan

Bagian 2: Tantangan Krisis Iklim

Studi Kasus Penyediaan Air Minum Pedesaan



(Willets J, 2024)

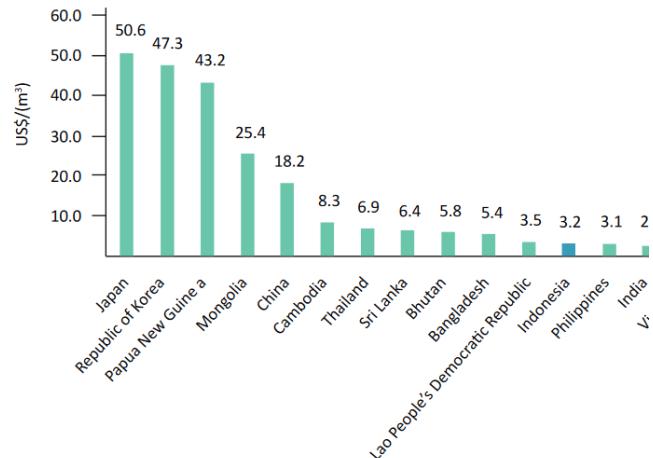
(Indonesia CCDR, WB, 2023)

Tantangan Sumber Daya Air

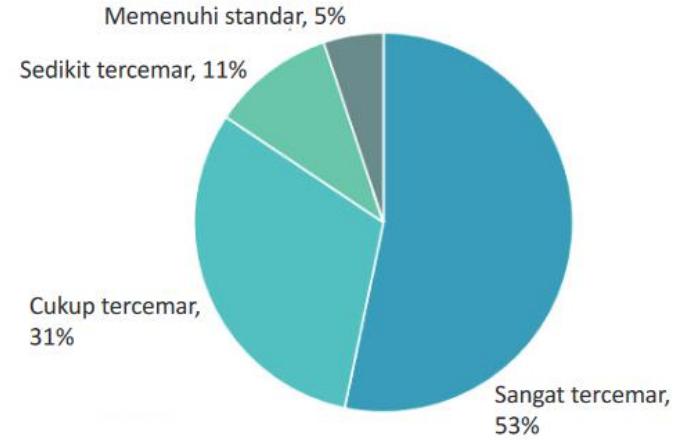
Peta 2: Kelangkaan air pada musim kemarau di Indonesia dalam kaitannya dengan wilayah sungai yang menyumbang 60% dari PDB (2045)



Gambar 12: Total produktivitas air (US\$/m³) di seluruh negara Asia



Gambar ES.8: Status kualitas air sungai di seluruh Indonesia (2019)



Sumber: WB, 2022

Dampak Perubahan Iklim Sudah Terasa



DOSENATASI BPBD KABUPATEN BOGOR
The Regional Disaster Mitigation Agency (BPBD) of Bogor Regency distributed water to residents in several villages in Jasinga and Nanggung Districts, Bogor Regency, West Java. Drought and clean water crisis have been felt by residents since June 2nd, 2023.

BOGOR, KOMPAS - The government of Bogor Regency in West Java distributed 65,000 liters of clean water assistance to 5,263 residents affected by drought in Jasinga and Nanggung districts, western part of

hpbd@probolingkab.go.id +62 335 424071 "Masuki Awal Musim Kemarau, Gunakan Air Seperlunya. Tingkatkan Efisiensi Penggunaan Air" Home Profil Berita Publikasi Galeri Peta Kontak BERITA

Awal Agustus 2023, 10 Desa pada 5 Kecamatan di Kabupaten Probolinggo Terdampak Krisis Air Bersih

Sasar 66 KK Terdampak Kekeringan, 16 Ribu Liter Air Bersih Disalurkan ke Sukoharjo

Dua bulan terakhir Dukuh Babalan mengalami krisis air bersih.

Rep: Muhammad Noor Aflian Red: Yusuf Asidq



REPUBLICA

Berengamen Detik Perspektif Organaya RI

Sejumlah warga Dusun Kabantaman, Desa Kalicayen, Kecamatan Semarang, menyampaikan berbagai waslah untuk menambah bantuan air bersih di lingkungannya. Jumat (11/8/2023). | Republika/Dewa Pribadi



MUAKHMAD SAFUAN
Volume air di pintu bendungan di Sungai B1 di Kecamatan Guntur, Kabupaten Demak, Jawa Tengah alami penyusutan pada 2018 saat musim kemarau.

DESA terlanda kekeringan dan kekurangan air bersih di Kabupaten Demak, Jawa Tengah terus bertambah. Dari sebelumnya tercatat 11 desa kini telah mencapai 62 desa, bantuan air bersih juga masih terus digelontorkan meski stok semakin menipis.

Sumber koleksi gambar: Willetts, J, 2024

In Dumai, kekeringan dalam waktu Panjang, korosi dari salinitas di daerah Pantai menjadi ancaman utama



BAPPENAS

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Knowledge Partnership Platform
Australia - Indonesia



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



Center for Regulation Policy and Governance



UNIVERSITAS
INDONESIA
Veritas, Probatus, Inclusa | Est 1893



Institute for
Sustainable
Futures

Di Sintang, sumber air dari sungai sangat dipengaruhi curah hujan dan banjir



Di Sumba Timur, banjir merusak intake di mata air dan pipa transmisi; badai merusak panel surya



Di Banyak Pedesaan di Jawa Barat: Musim Hujan, Air Sulit



Reservoir Pamsimas di Desa Bojong Koneng, Sentul, kering karena setiap kali hujan, lumpur membuat mampet pipa (2024/04/24). Karena kelelahan selalu melakukan perbaikan ketika hujan, 2 pengurus jatuh sakit



Suplai air Pamsimas di Desa Sukajadi, Kab Bogor (Kaki Gunung Salak) tidak jalan menjelang Idul Fitri karena hujan deras di atas. Perbaikan harus dilakukan dengan jalan kaki selama 4 jam (2024/04/23)



Banjir Mengancam Infrastruktur Air



banjir bandang tersebut menimpa beberapa kampung di Desa Sukamukti, Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut. paling parah terjadi Kampung Ciloa, Desa Sukamukti.



Kita harus menggunakan air dari sawah (saluran irigasi) akhirnya gatal-gatal... Ini [berlangsung sekitar] dua bulan. Terutama anak-anak bayi banyak terkena gatal-gatal.... (FGD Ibu-ibu). Yang kasihan balita pas tidur malam, mereka gatal-gatal, banyak yang terkena penyakit kulit (FGD Bapak-Bapak)

Susah dapat air bersih.... Suka berantem ketika bantuan air datang. Capek juga bawa air. Berantem dengan tetangga rebutan air. Banyak yang nggak kebagian



Bagian 3: Aksi Legislatif untuk Akses Air Berketahanan Iklim

Kita Perlu UU Pelayanan Air dan Sanitasi

NEWS • INDONESIA

Indonesia needs a strong water services law

The current condition in the water and sanitation sector is bleak

Mohamad Mova Al`Afghani (The Jakarta Post)

UK • Mon, August 31, 2009

Op-Ed ini saya tulis pada tahun 2009. 15 tahun kemudian (hari ini) kita masih **belum punya** UU Pelayanan Air dan Sanitasi

PP 122/2015 bukan UU Pelayanan Air dan Sanitasi, PP tersebut hanya menerapkan segelintir pasal dari UU SDA 17/2019



LAWS OF MALAYSIA

Act 655

WATER SERVICES INDUSTRY ACT 2006



THE STATUTES OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE

PUBLIC UTILITIES ACT 2001

Vietnam: To unify 03 policies in the Proposal to develop a Law on Water Supply and Drainage



09.22, 04/12/2023

According to Resolution 203/NQ-CP dated December 1, 2023 at thematic session on lawmaking in November, the Government of Vietnam unified 03 policies in the Proposal to develop a Law on Water Supply and Sewerage.

Dương Châu Thành

Vietnam: To unify 03 policies in the Proposal to develop a Law on Water Supply and Drainage

Specifically, the Government basically agrees with 03 policies in the Proposal to develop a Law on Water Supply and Drainage as proposed by the Ministry of Construction, including:

- (1) Develop water supply and drainage synchronously, consistently, and effectively according to strategies, planning and plans;
- (2) Manage, operate, and exploit water supply and drainage systems;
- (3) Ensure resources for water supply and drainage development.

Beberapa Fitur UU Pelayanan Air dan Sanitasi

- Pengakuan legal untuk berbagai model penyediaan layanan air dan sanitasi (PDAM, berbasis Masyarakat dsb)
- Regulasi Monopoli Alamiah
 - Mewajibkan konsolidasi PDAM sesuai dengan *economy of scale and scope* (mengubah lampiran UU Pemerintahan Daerah)
 - Menarik kewenangan air minum dan sanitasi apabila daerah tidak mampu menyelenggarakan (hal ini pernah dilakukan di Malaysia)
 - Membuat badan regulator independen dan regulasi tarif berdasarkan insentif (contoh: RPI-K/price cap, apabila PDAM efisien, maka tarif yang dikenakan akan dikurangi dengan efisiensi PDAM)
- Perlindungan Konsumen
 - Penerapan standar layanan disertai insentif dan disinsentif (contoh: apabila air tidak mengalir dalam 24 Jam, maka konsumen diberi ganti rugi)
- Partisipasi Publik dan Transparansi
 - Memastikan pelayanan air tidak dilakukan dengan **cherry picking** (menyambungkan hanya ke wilayah elit atau bisnis)



Ruang Pengaturan Sanitasi Sangat Terbatas



Diskusi RUU SDA Tahun 2018 dengan fraksi Gerindra/Komisi V



Penyerahan rekomendasi RUU SDA dari Jejaring AMPL ke Komisi V (2018)

Sanitasi hanya disebut **satu kali** dalam penjelasan Pasal 24 UU SDA 17/2019; itu pun setelah melalui advokasi yang panjang

Konsekuensinya: **tidak bisa** ada PP Sanitasi, pengaturannya “terpaksa” dicantolkan di air minum

Akibatnya...

“Hanya 7,4% air limbah kota yang diproses secara aman”

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3, Pasal 7, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan serta untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 122 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

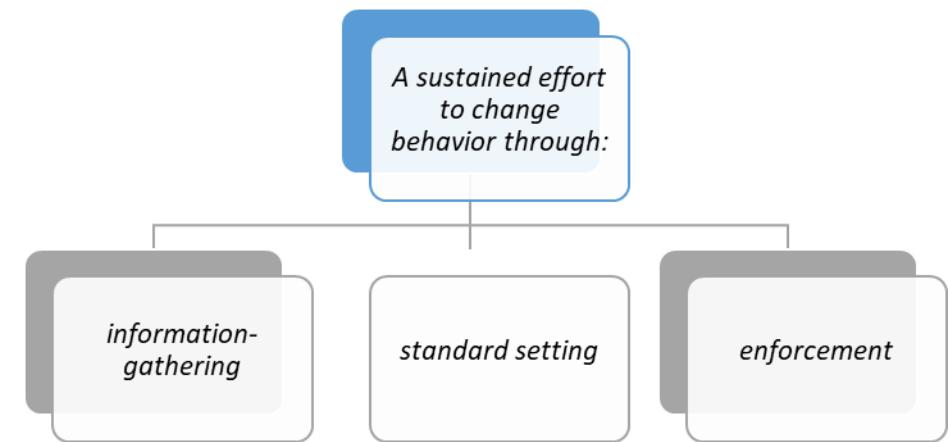


70% AIR RUMAH TANGGA INDONESIA TERCEMAR TINJA, UNICEF BIKIN KAMPAÑE #DIHANTUITAI

Perlu Omnibus Law untuk Krisis Iklim

1. Tantangan iklim bersifat multisektor: tata ruang, pertanian, kehutanan, sumber daya air, pelayanan air, ketahanan pangan, energi, dan sebagainya → Perlu Omnibus Law
2. Omnibus Law Krisis Iklim (OLKI) sebaiknya memberikan prioritas utama pada adaptasi; mitigasi diprioritaskan sejauh sejalan dengan adaptasi, misalnya konservasi lahan gambut
3. Omnibus Law Krisis Iklim perlu mengadopsi **prinsip-prinsip *regulasi adaptif***

Definisi Regulasi



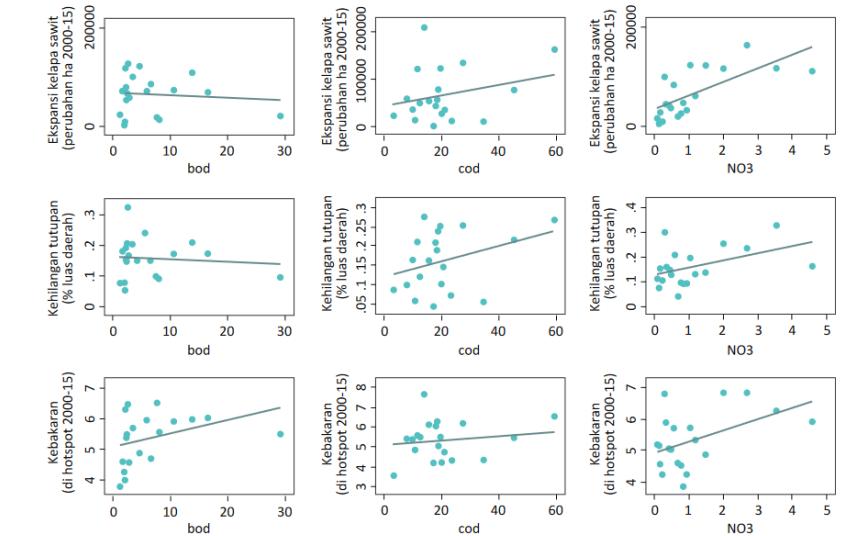
Regulasi ≠ Hukum

Prinsip 1: Pembangunan masa kini tidak boleh mengganggu adaptasi iklim di masa depan

- Banjir akan makin parah
- Kekeringan akan semakin parah
- Badai dan cuaca buruk akan semakin meningkat
- Air tanah harus dijadikan tabungan masa depan



Gambar 18: Korelasi ekspansi kelapa sawit, deforestasi, dan kebakaran hutan, dengan kualitas air



Perkebunan kelapa sawit memperburuk kualitas air (belum termasuk pabrik) – (WB, 2022)



Krisis Air Bersih Hantui Pulau Wawonii Kala Tambang Nikel Mulai Beroperasi

oleh Riza Salman [Wawonii] di 6 June 2023



Prinsip 2: Peraturan Harus Mudah Diubah (Karena alam juga akan cepat berubah)

1. Undang-Undang
mengatur hal-hal
**pokok, azas dan prinsip
umum** saja

2. Standar, prosedur
diatur tingkat Peraturan
Menteri/Peraturan
Presiden

PP perlu waktu tahunan
untuk diubah, sementara
dalam 5 tahun entah apa
yang akan terjadi dengan
iklim



- 3 -

KODE LIMBAH	ZAT PENCEMAR	KATEGORI BAHAYA
A108c	Natrium Hidroksida	1
A109c	Asam Suflat	1
A110c	Asam Klorida	1
d. Tidak Spesifik Lain:		
A101d	Limbah yang mengandung senyawa POPs dan UPOPs antara lain <i>polychlorinated biphenyls</i> (PCBs), DDT, PCDD, PCDF	1
A102d	Aki/baterai bekas	1
A103d	Debu dan fiber asbes antara lain asbes biru (<i>crocidolite</i>), asbes coklat (<i>amosite</i>), asbes abu-abu (<i>anthophyllite</i>)	1

KASUS	KODE	KETERANGAN	JENIS LIMBAH	PERIODIK	WAKTU	BUJKN	SELURUH	MENTERI	PERIODIK		
									BUJKA	WAKTU	
26.	42202	Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih	Kelompok ini mencakup usaha rancang bangun konstruksi sipil pengolahan air bersih seperti bangunan penyadap dan penyalur air baku, bangunan pengolahan air baku, bangunan pengolahan air	Usaha Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	NA	Menengah tinggi	NIB dan Sertifikat Standar	15 hari	BUJKN: Selama pelaku usaha menjalankan usahanya. Kantor Perwakilan BUKA: 3 (tiga) tahun dan dapat	Seluruh	Menteri



Prinsip 3: Internalisasi trade-off

Tipe	Deskripsi
1. Tradeoff Adaptasi vs. Mitigasi	Tindakan adaptasi, seperti membangun tembok laut atau mengubah penggunaan lahan untuk mencegah kerusakan akibat banjir, dapat bertentangan dengan upaya mitigasi seperti melestarikan penyerapan karbon. Dalam pertanian, mengubah hutan menjadi lahan pertanian meningkatkan produksi pangan tetapi mengurangi penyerapan karbon, yang merupakan contoh tradeoff antara meningkatkan hasil pertanian dan mempertahankan tutupan hutan sebagai strategi mitigasi.
2. Tradeoff Mitigasi vs. Mitigasi	Ini terjadi ketika dua strategi mitigasi bertentangan. Misalnya, mempromosikan bioenergi untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil mungkin bersaing dengan upaya penghijauan, karena kedua strategi memerlukan lahan. Keputusan harus menyeimbangkan manfaat langsung dari bioenergi dengan manfaat penyimpanan karbon jangka panjang dari hutan.
3. Tradeoff Adaptasi vs. Adaptasi	Berbagai strategi adaptasi juga dapat bertentangan. Misalnya, meningkatkan pengalihan air untuk mengamankan pasokan air perkotaan dapat mengurangi aliran sungai yang diperlukan untuk mempertahankan ekosistem lahan basah, yang juga penting untuk adaptasi dengan menahan badai dan banjir.
4. Tradeoff Antara Kebijakan Iklim dan Tujuan Sosial Lainnya	Kebijakan yang bertujuan untuk tujuan iklim mungkin bertentangan dengan tujuan sosial lainnya. Misalnya, kebijakan mitigasi yang ketat dapat menyebabkan biaya energi yang lebih tinggi, yang berdampak pada pengembangan ekonomi dan upaya pengurangan kemiskinan.

Prinsip 4: Berikan diskresi yang luas pada Kementerian/Badan



REGULASI TRADISIONAL (COMMAND AND CONTROL)
SANGAT KAKU DAN TIDAK RESPONSI TERHADAP
PERUBAHAN YANG CEPAT



DENGAN MENGGUNAKAN DISKRESI EKSEKUTIF, MAKA
REGULASI AKAN BISA LEBIH LINCAH, EFISIEN DAN
BERBASIS KEAHLIAN



NAMUN DEMIKIAN, DISKRESI YANG LUAS DAPAT
MEMICU PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN, MAKA
DARI ITU FUNGSI PENGAWASAN PERLU DIPERKUAT

Prinsip 5: Penguatan Pengawasan Legislatif

Beberapa metode pengawasan:

- Pelaporan berkala
- Evaluasi berkala terhadap hasil dan proses
- “Sunset Clause”: Diskresi yang besar diberikan batasan waktu dan hanya dapat diperpanjang lewat UU



Renungan:

*Apakah Hukum dan Institusi akan mampu
“beradaptasi” dengan perubahan iklim?*

Terima Kasih